

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Meutia Nanda¹, Alfiya Syahri², Arima Bancin³, Galuh Indah Pratiwi⁴, Salma Maulisa⁵, Sherien Sakina⁶, Shoffi Aufa Siirin⁷

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20353
Email: sheriensakina418@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan dan mengabaikan dampak lingkungan dapat membahayakan lingkungan. Berbagai aktivitas manusia yang menggunakan sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, serta pencemaran. Dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan industri dan masyarakat wilayah provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara wawancara mendalam terhadap sebagian pegawai yang memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provsu dalam mengatasi pencemaran lingkungan wilayah provinsi Sumatera Utara. Dan belajar cara penanggulangan pencemaran lingkungan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provsu. Hasil penelitian menunjukkan Keberhasilan implementasi dalam pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provsu tidak cukup efektif. Hal ini dilihat dengan tidak dilaksanakannya SOP, meskipun sudah sesuai rencana. Dan maksud dan tujuan yang ditetapkan dengan menyertakan peran masyarakat masih minim dalam hal pemberitahuan dan informasi yang disampaikan agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan dengan pengawasan yang dilaksanakan belum cukup efektif dan berhasil dikarenakan kepuasan masyarakat yang menilai masih kurangnya pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pengolahan sampah industry maupun rumah tangga.

Kata Kunci: Pengawasan, Penanggulangan, Pencemaran

ABSTRACT

The environment is something that affects the survival and well-being of humans and other living things. Excessive exploitation of the environment and ignoring environmental impacts can harm the environment. Various human activities that use natural resources cause damage to the environment and ecosystems, as well as pollution. In order to prevent environmental pollution caused by various industrial and community activities in the province of North Sumatra, it is necessary to monitor and control pollution prevention carried out by the Department of the Environment of North Sumatra Province. The method in this research is to use descriptive method with qualitative analysis. This study uses in-depth interviews with some employees who have important positions in the agency concerned and know well the problems to be studied. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the supervision of the Provincial Environmental Office in overcoming environmental pollution in the province of North Sumatra. And learn how to deal with environmental pollution by the Provincial Environmental Service. The results of the research show that the successful implementation in monitoring the Provincial Environmental Office is not effective enough. This can be seen from the non-implementation of the SOP, even though it was according to plan. And the aims and objectives set by involving the community's role are still minimal in terms of notifications and information conveyed so that the community can find out and participate in the activities carried out. Evaluation of the implementation with the supervision carried out has not been effective and successful enough due to community satisfaction which assesses the lack of services from the North Sumatra Province Environmental Service in processing industrial and household waste.

Keywords: *Supervision, Countermeasures, Pollution*

LATAR BELAKANG

Masalah lingkungan hidup ini sebagai suatu permasalahan pada seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini sebagai perhatian masyarakat. Lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan dan perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, sudah menyebabkan permasalahan bagi lingkungan. Eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak memerhatikan akibatnya di lingkungan yang bisa mengancam lingkungan hidup.

Dengan banyaknya pencemaran yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan hidup serta ekosistem. Dari permasalahan lingkungan tersebut maka perlu adanya upaya buat perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan meningkatkan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibentuklah Satuan Perangkat Kerja Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada saat ini menghadapi persoalan terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat dari meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, selanjutnya berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan keselamatan manusia. Dari berbagai permasalahan, yang patut buat diperhatikan lebih lanjut di lingkungan kota Medan, sebab permasalahan tersebut bersifat krusial serta marak diperbincangkan, dan permasalahan tersebut merupakan adanya pencemaran air sungai oleh limbah cair industri, rumah sakit dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta limbah domestik.

Dengan banyaknya pencemaran lingkungan yang semakin tidak terkontrol serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam ekosistem lingkungan hidup dan makhluk hidup, maka perlu dilakukan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan cara melakukan suatu pengawasan yang lebih efektif dan instensif oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan sanksi yang tegas, karena pencemaran lingkungan tersebut sudah sangat memprihatinkan serta mengancam kualitas lingkungan dan keselamatan manusia.

Adanya pengawasan yang efektif sangatlah perlu buat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi, untuk mengatasi segala masalah pencemaran lingkungan di Kota Medan seperti yang kian marak terjadi yang mencakup pencemaran dari limbah industri, limbah rumah sakit, dan rumah tangga domestik yang melakukan pencemaran dengan membahayakan lingkungan sekitar, serta tidak memiliki dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang baik.

Dengan menindak lanjuti terhadap adanya pencemaran lingkungan serta perusakan lingkungan maka diterbitkanlah Undang-Undang yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkenaan dengan hal itu maka dibentuklah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang membantu tugas Walikota Medan pada menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan serta pengendalian dampak lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara wawancara mendalam terhadap sebagian pegawai yang memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari - Februari 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mewawancarai para pegawai yang mewakili terkait proklamasi, dengan deskripsi narasumber sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Agoestiyah Melaz, S.Sos	198008202009021002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Laki-Laki
2.	M. Ali Syamsudi, SE	197703272008011014	Analisis Perencanaan	Laki-laki
3.	Andri	198206062010011002	Pengadministrasi Persuratan	Laki-laki
4.	Jennie Regiyana, SE	197610192008012002	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Perempuan
5.	Mai Wasfi, SH	198105312007011002	Penelaah Dampak Lingkungan	Laki-Laki

6.	Nurmalia Dewi Tambunan , SE	198403262010012008	Penyusun Laporan Keuangan	Perempuan
----	--------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan menggunakan panduan wawancara berdasarkan kategorisasi yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengawasan penanggulangan pencemaran lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agoest Syahmelaz, S.sos selaku kasubbag umum, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan di DLH ProvSu, pihak kantor memiliki wewenang dan rencana yang dapat berupa pemantauan, meminta keterangan serta salinannya, membuat poin penting dari dokumen tersebut, melakukan dokumentasi yang berupa rekaman, foto dan pengambilan sampel serta dilakukan pemeriksaan. Kemudian, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti tim pengawasan akan langsung ke lapangan sedangkan secara tidak langsung berarti tim pengawas akan melakukan verifikasi data.

Prosedur pengawasan langsung dapat dilakukan dengan melakukan rapat intern terlebih dahulu, lalu menyiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan seperti untuk pengambilan sampel, dan lingkungan tempat pencemaran akan diperiksa secara keseluruhan yang dimulai dari ketersediaan dokumen lingkungan dalam berbagai bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan air, udara dan limbah B3.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Ali Syamsuddin selaku analisis perencanaan dengan pertanyaan bagaimana tipe pencemaran yang di pantau serta ditanggulangi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Beliau menjawab bahwasanya limbah yang dihasilkan biasanya berbeda-beda yaitu terdapat limbah cair, limbah padat dan bahkan polusi udara. Hal itu bisa terjadi tidak terlepas dari kegiatan masyarakat itu sendiri seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, limbah rumah tangga yang tidak diatasi dan bahkan limbah industri serta rumah sakit. Pada polusi udara atau limbah udara pada umumnya disebabkan oleh penggunaan transportasi dan industri yang menghasilkan gas ke udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan apakah pengawasan dalam penanggulangan pencemaran sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Bapak M. Ali Syamsuddin berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan tentu harus sesuai prosedur atau SOP yang berlaku yaitu langkah pertama melakukan investasi. Investasi yaitu mendata kembali kegiatan pada tahun sebelumnya. Langkah kedua yaitu melakukan pembahasan terkait data penyusunan rencana operasional. Langkah ketiga, membuat penyusunan operasional, penyampaian dan mengedarkan surat pengawasan. Langkah keempat, membuat surat berita acara dan laporan perenam bulan. Langkah kelima, melakukan pengawasan sekaligus penerapan tindak lanjut kegiatan.

b. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jennie Regiyana selaku Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di DLH ProvSu dengan pertanyaan bagaimana peran DLH ProvSu dalam upaya tercapainya pelaksanaan pengawasan penanggulangan pencemaran lingkungan. Menurut beliau, dalam hal tersebut pihak DLH ProvSu melakukan program-program dibidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang berupa adanya bank sampah, pendiklatan kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) dan memberikan informasi terkait kualitas sumber air yang ada di Sumatera Utara supaya adanya koordinasi antara masyarakat dan pihak swasta terkait.

Kemudian, terkait pertanyaan apakah pelaksanaan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Menurut Ibu Jennie Regiyana, dalam pelaksanaan monitoring (pengawasan) dasarnya sudah sesuai dengan sasaran. Tetapi terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat yang dimana program-program yang telah diusung diubah kembali oleh masyarakat dalam kemudahan memperoleh pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agoestiyah Melaz selaku Kasubbag Tata Usaha dengan pertanyaan, bagaimana upaya DLH ProvSu dalam mengatasi hambatan dari pengawasan dan penanggulangan yang dilakukan. Menurut Pak Agoestiyah Melaz, yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengupdate informasi terbaru mengenai pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian, adanya kegiatan ke lapangan sekitar masyarakat agar program tersebut diketahui oleh masyarakat

Pertanyaan terkait partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh DLH ProvSu dijawab oleh Ibu Jennie Regiyana bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pengawasan penanggulangan pencemaran lingkungan tidak hanya dari pihak DLH Provsu namun juga terdapat masyarakat yang terlibat. Harapannya masyarakat dapat melakukan eksploitasi lingkungan hidup berdasarkan aspek pelestarian lingkungan sehingga dapat digunakan oleh generasi berikutnya.

c. Menerapkan pemantauan dan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Nurmala Dewi Tambunan , SE selaku penyusun laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. dengan pertanyaan mengenai Bagaimana upaya waktu pengawasan yang dilakukan DLH Provsu terhadap pelaksanaan pengawasan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan, bapak Mai Wasfi menyatakan bahwa menurut beliau DLH Provsu melakukan pemantauan minimal satu tahun sekali, namun terkadang DLH Provsu melakukan pemantauan dua kali untuk menunjukkan kesamaan atau akurasi laporan yang diamati. Seperti tindak lanjut sebelumnya, bisa terjadi tiba-tiba tanpa jadwal jika benar-benar mendesak dan perlu mendadak.

Dalam pertanyaan mengenai apa yang dijadikan sanksi yang diberlakukan bagi pencemaran lingkungan dari sanksi yang ringan hingga berat. Tanggapan bapak Mai Wasfi menyatakan bahwa Peringatan yang paling ringan dapat berupa surat peringatan pencabutan izin dan pembekuan izin lingkungan. Tingkatan sanksinya

adalah mengundang instansi yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan dalam skala besar seperti industri atau rumah sakit, dan dalam skala kecil seperti warga atau masyarakat untuk menjelaskan dan membela fakta-fakta pengamatan lapangan yang ada, peringatan hingga 1 - 3. kali sanksi administratif, Pembatalan izin lingkungan dan pencabutan izin. Kewenangan penjatuhan sanksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai terhadap para pencemar.

Mengenai pertanyaan berikutnya ada berapa jumlah pengawas di lokasi saat pemeriksaan dilakukan oleh DLH Provsu. Beliau bapak Mai Wasfi menanggapi bahwa jumlah hanya ada dua pengawas dan satu koordinator di lapangan. Kenyataannya, pengawas lapangan masih belum mampu mengawasi banyak industri atau institusi seperti rumah sakit dan kawasan pemukiman. Harapannya adalah memaksimalkan penyampaian jasa lingkungan di Provinsi Sumatera Utara agar mampu mengawasi banyak industri atau institusi maupun pemukiman agar terlaksana upaya penanggulangan pencemaran lingkungan.

Pada pertanyaan bagaimana metode dan bentuk pengawasan yang dilakukan pihak DLH Provsu dalam penanggulangan pencemaran lingkungan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh bapak Andri selaku Pengadministrasi Persuratan, bahwa beliau menyatakan metode yang digunakan DLH Provsu sama dengan rencana yang telah disusun yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan memantau pengamatan setiap enam bulan atau dua kali setahun untuk memastikan keakuratan data dan bergabung. itu untuk berpartisipasi. keluhan atau laporan yang disampaikan, orang mengeluh dan mengeluh.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pemulihan terhadap pelaksanaan pengawasan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andri selaku Pengadministrasi Persuratan DLH Provsu dengan pertanyaan apa tanggapan dengan kepuasan masyarakat mengenai adanya kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh DLH Provsu. Beliau menanggapi menurutnya, kepuasan merupakan faktor acuan penting bagi petugas pelayanan lingkungan di DLH Provsu karena dapat menentukan dan mengukur keberhasilan unit pengabdian kepada masyarakat.

Dilihat dari respon layanan. tingkat kepuasan yang diinginkan berbeda-beda. Ada masyarakat yang cukup puas dengan pelayanan dan kegiatan DLH Provsu, seperti program bank sampah. Ada juga masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang ditawarkan, misalnya dalam penanggulangan pencemaran limbah domestik atau limbah kegiatan domestik, yang bisa berupa B3 (bahan beracun dan berbahaya). Jadi, kepuasan masyarakat terhadap layanan dan hasil yang kami berikan bervariasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Nurmala Dewi Tambunan , SE selaku penyusun laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai agar sesuai dalam rencana kerja yang ada di DLH Provsu. Menurut beliau tentunya petugas DLH Provsu sudah memiliki jadwal lebih awal sebelum melaksanakan kegiatan. Dan pada saat supervisi dilakukan, aturan dan prosedur diikuti sesuai dengan rencana kerja yang ada. Oleh karena itu, karyawan yang melakukan pengawasan dikoordinasikan dan dilatih terlebih dahulu. Sehingga tindakan yang dilaksanakan tercapai dengan hasil dan tujuan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Mai Wasfi, SH selaku Penelaah Dampak Lingkungan. Dengan pertanyaan apa saja upaya yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sehingga dapat dijadikan solusi dalam pencemaran lingkungan. Menurut beliau, hal ini muncul dari kesadaran masyarakat. DLH Provsu dan pemerintah harus bersinergi dan berupaya memerangi pencemaran lingkungan melalui kerjasama dengan masyarakat.

Di antaranya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan mana sampah yang dapat didaur ulang dan mana yang tidak seperti sampah industri karena sangat sulit terurai. Karena masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau selokan, hal ini menjadi masalah dan timbulan sampah dari kegiatan domestik. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan penghijauan.

Hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana DLH Provsu melakukan evaluasi setelah melakukan pengawasan dilapangan, sehingga berbagai kendala dan kesulitan dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut dan berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian pertanyaan tersebut ditanggapi oleh bapak Mai Wasfi, SH selaku Penelaah Dampak Lingkungan. Beliau menyatakan tentunya pihak DLH Provsu selalu melakukan penilaian setelah melakukan pemantauan lapangan. Pasalnya, penerapan penertiban ini akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Tentunya penilaian ini akan menyelesaikan kendala dan keluhan yang ada yang harus diinvestigasi untuk memenuhi harapan masyarakat DLH Provsu dan pekerja di DLH provsu.

PEMBAHASAN

a. Adanya Pelaksanaan Pengawasan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sesuai dengan Perencanaannya

Dari output wawancara mengenai adanya pelaksanaan supervisi penanggulangan pencemaran lingkungan telah sinkron menggunakan perencanaan. Menyatakan bahwa, pada melaksanakan supervisi buat penanggulangan pencemaran lingkungan adanya planning dan kewenangan menggunakan 2 metode cara supervisi misalnya langsung & tidak langsung. Ada beberapa hal yang dilakukan pada melaksanakan kewenangan supervisi terhadap pencemaran misalnya; adanya pemantauan, menciptakan salinan & dokumen dan menciptakan catatan yang dibutuhkan, dokumentasi foto & rekaman audio visual, & merogoh model sampel dan mempelajari peralatan. Dalam melakukan supervisi inspeksi holistik hal tentang lingkungan berdasarkan dokumen & perizinan lingkungan hayati dan diperiksa pengendalian, pengelolaan pencemaran air, udara, & limbah B3.

Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan yang diawasi penanggulangannya yakni berbentuk limbah yang didapatkan beranekaragam misalnya limbah cair, limbah padat & limbah udara yang asalnya berbeda-beda hal yang berkaitan menggunakan aneka macam aktivitas rakyat. Umumnya aktivitas yang dilakukan membentuk limbah & pencemaran sebagai akibatnya diperlukannya supervisi atas pencemaran yang terjadi. Adapaun supervisi yang dilakukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah sinkron menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun, secara surat keputusan belum dibuat. Dan langkah-langkahnya berupa investasi yakni aktivitas yang dilakukan tahun sebelumnya, pembahasan data bahan penyusunan

planning operasional, penyusunan planning operasional, pembuatan & pengedaran surat pemberitahuan supervisi & monitoring, pembuatan format surat tugas & liputan program dan laporan periodik per-enam bulan, aplikasi supervisi bersamaan menggunakan implementasi taraf lanjut output berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan.

Dan supervisi penanggulangan pencemaran lingkungan yg dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Provsu berjalan sinkron menggunakan yg diperlukan masyarakat walaupun masih adanya beberapa keluhan yg disampaikan rakyat pada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provsu. Dari output analisis penulis, pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan sinkron menggunakan perencanaannya, karena planning & acara yg diusungkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provsu sangat tersusun & berjalan. Namun, belum paripurna tentang pelaksanaan supervisi yang belum memenuhi SOP dikarenakan adanya kekurangan pada hal surat keputusan yg belum dibuat.

Seharusnya bisa dikatakan paripurna pelaksanaan tadi jika semua aktivitas yang dilaksanakan lengkap secara file data & acara aktivitas nya dan planning yang sudah ditetapkan. Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan supervisi wajib mempunyai perencanaan & pertanggung jawaban dan pemantauan & monitoring atas supervisi terhadap pencemaran yg dilakukan supaya bisa menaruh kualitas perencanaan pembangunan yg ideal. Maka Dinas Lingkungan Hidup Provsu haruslah menjalankan perencanaannya sinkron menggunakan SOP menggunakan memenuhi : (a) Investasi, data aktivitas tahun sebelumnya, (b) Pembahasan data bahan penyusunan planning operasional, (c) Penyusunan planning operasional pembuatan & penyampaian surat pemberitahuan monitoring ataupun supervisi, (d) Pembuatan format surat tugas, liputan program, & laporan periodic per-enam bulan, Pelaksanaan monitoring & supervisi bersamaan menggunakan implementasi tindak lanjut output aktivitas.

b. Adanya Tujuan dan Sasaran dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pencemaran Lingkungan

Dari wawancara tentang peran Badan Layanan Lingkungan Kota Medan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengendalian pencemaran, yaitu melalui pelaksanaan program khusus di bidang pengendalian dan pengendalian pencemaran lingkungan. Ini termasuk (a) memberikan bank sampah, (b) pelatihan pengelolaan sampah, (c) pelatihan 3R (reduce, reuse, recycle), dan (d) memberikan informasi tentang kondisi kualitas air di sungai perkotaan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya sejalan dengan situasi pelaksanaan, namun melalui pengamatan dan penelitian ditemukan juga hambatan dari masyarakat. Yakni, 59 orang ditemukan tidak mengetahui adanya program dan tidak mengikuti program yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga mengalami kendala dalam melakukan pengendalian pencemaran, dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berupa tindakan seperti mengedukasi masyarakat tentang program Dinas Lingkungan Hidup. Melalui beberapa cara langsung dan tidak langsung seperti; (a) Memberitahukan informasi terakhir atau terkini tentang pelaksanaan rencana kerja yang akan dilakukan, (b) Terjun langsung ke lokasi sehingga masyarakat juga dapat

berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana tersebut sehingga mereka tahu bahwa itu akan dilakukan kegiatan atau telah dilakukan.

Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan sebagai realisasi pelaksanaan tujuan pencegahan pencemaran, karena dalam hal ini pegawai Balai Lingkungan Hidup Kota Medan dan masyarakat sekitar harus saling berpartisipasi untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Karena peran penting komponen lingkungan adalah masyarakat sekitar.

Ditinjau dari analisis penulis terhadap hasil implementasi program yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Lingkungan Kota Medan sangat tepat terutama jika menyangkut peran masyarakat dalam saling bergotong royong dalam menjaga kualitas lingkungan. Namun masih terdapat kekurangan dalam partisipasi masyarakat sekitar yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi pelaksanaan proyek yang diadakan oleh Pusat Pelayanan Lingkungan Kota Medan dan situasi tidak berpartisipasi. Salah satu penyebab masyarakat 60 adalah ketidak tahuan akan informasi tersebut, dan itu harus menjadi peran masyarakat dalam menjalankan program-program yang sedang dilaksanakan.

Dalam hal ini, masyarakat belum terinformasi secara efektif tentang implementasi program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Informasi harus memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai sumber pemberitahuan tentang kegiatan yang akan datang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program-program seperti (a) penyediaan bank sampah, (b) pemberian pelatihan pengelolaan sampah, (c) pemberian Pelatihan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan (d) sosialisasi mengenai kondisi kualitas air sungai di Kota Medan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penanggulangan. Dan pentingnya peran masyarakat adalah agar mereka dapat memanfaatkan dan menjaga lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan hanya perlu lebih berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan dan inisiatif yang dilakukan.

c. Adanya Pelaksanaan Pengelolaan Pencemaran Meliputi Pemantauan dan Koordinasi Lingkungan

Berdasarkan hasil survei mengenai waktu pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam melakukan pengawasan. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan pemantauan minimal setahun sekali. Namun, Dinas Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Binjai sesekali melakukan pengawasan dua kali dalam setahun untuk mencari dan membuktikan kesamaan atau keakuratan laporan pemantauan lapangan.

Ada juga pengamatan lanjutan yang bisa terjadi dan dilakukan secara tiba-tiba tanpa perencanaan sebelumnya, kegiatan dilakukan secara mendesak dan benar-benar mendadak jika diperlukan. Dari sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat yang dikenakan kepada pelaku pencemar yaitu berupa peringatan dari sanksi dan peringatan yang paling ringan hingga pencabutan izin, hingga pembekuan izin lingkungan dari sanksi yang paling berat. Pelaksanaan pengenaan sanksi dibagi dalam beberapa tahapan yaitu: meminta instansi atau industri yang bertanggung jawab atas pencemaran dan warga setempat untuk memperbaiki dan mengklarifikasi keadaan yang ada mengenai pencemaran yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan di tempat, teguran, denda, pembekuan dan pencabutan izin. Mengenai jumlah pengawas yang

turun ke lapangan, terdapat dua staf dan satu koordinator pembagian kerja dalam observasi lapangan yang direncanakan untuk menampung jumlah pengawas lapangan.

Metode yang digunakan oleh Dinas Perlindungan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara mirip dengan rencana yang disiapkan oleh dinas, yaitu: Melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung dengan melakukan pengamatan setengah tahunan atau setengah tahunan untuk menyaring informasi. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran tidak efektif karena jumlah pengawas lapangan tidak mencukupi untuk melakukan observasi lapangan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara, terdapat banyak industri dan institusi, seperti rumah sakit dan peternakan, serta sungai-sungai yang berdekatan dengan pemukiman penduduk yang harus diwaspadai pencemarannya. Namun, keterbatasan jumlah tenaga lapangan memaksa pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk memanfaatkannya dengan mendistribusikan program observasi lapangan yang diselenggarakan sesuai dengan jumlah tenaga kerja.

Dari gambaran pengawasan dan koordinasi pengendalian pencemaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas tersebut minimal satu kali dalam setahun. Di sisi lain, pemantauan dilakukan dua kali setahun untuk menunjukkan kesamaan laporan dengan pengamatan sebelumnya. Serta adanya tindak lanjut observasi yang dilakukan segera jika ada kebutuhan nyata. Namun, kurangnya personil yang melakukan perjalanan untuk melakukan pengamatan di lokasi membuat pemantauan dan koordinasi oleh dinas lingkungan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Jika jumlah pengelola lapangan direalisasikan dengan menambah petugas lapangan dan koordinatornya di setiap sektor, lembaga dan wilayah pemukiman, maka koordinasi akan jauh lebih efektif.

Output hasil wawancara tentang kepuasan masyarakat terhadap kegiatan tersebut dikendalikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provsu yaitu kepuasan pada tingkatan yang berbeda seperti; Ini adalah masyarakat puas dengan layanan dan kinerja perangkat lunak perbankan Sampah dan ada juga yang puas dengan pelayanan yang diberikan tapi merasa baik Pelayanan terkait penanganan sampah rumah tangga kurang atau limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga kita. Yang penting Pemantauan dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provsu terus berjalan sesuai dengan jadwal kerja yang telah disepakati, yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur serta jadwal kerja sudah diatur.

d. Adanya Evaluasi dan Pemilihan dalam Pelaksanaan Pengawasan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Output hasil wawancara tentang kepuasan masyarakat terhadap kegiatan tersebut dikendalikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provsu yaitu kepuasan pada tingkatan yang berbeda seperti; Ini adalah masyarakat puas dengan layanan dan kinerja perangkat lunak perbankan Sampah dan ada juga yang puas dengan pelayanan yang diberikan tapi merasa baik Pelayanan terkait penanganan sampah rumah tangga kurang atau limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga kita. Yang penting Pemantauan dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provsu terus berjalan sesuai dengan jadwal kerja yang telah disepakati, yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur serta jadwal kerja sudah diatur.

Adapun upaya dari masyarakat dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengidentifikasi sampah mana yang dapat didaur ulang dan mana yang tidak dapat diolah dan diurai kembali, serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan melakukan evaluasi setelah pengawasan lapangan karena pengawasan yang sudah dilakukan akan berlanjut untuk pengawasan yang akan datang. Juga, dengan menggunakan evaluasi ini, akan dapat mengatasi keterbatasan atau masalah yang ada saat ini untuk melakukan perbaikan dan beroperasi lebih bagus dan efisien selama pelaksanaan.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan pemantauan pencegahan pencemaran belum efektif dan efisien untuk memuaskan masyarakat yang masih merasakan kurangnya pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berupa pelayanan pengolahan pencemaran limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang bisa menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kemudian, adanya kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah ditempat dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih banyak membuang sampah rumah tangga ke sungai atau selokan sehingga menimbulkan sampah.

Dari uraian evaluasi dan reintroduksi langkah-langkah perlindungan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan pemantauannya secara terencana dan sesuai dengan jadwal dan prosedur kerja, tetapi belum bisa dikatakan efisien karena kurangnya pengendalian sampah rumah tangga, yang membuat masyarakat masih selalu bergantung pada pelayanan yang tersedia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bahwa keefektifan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada Penanggulangan Pencemaran Lingkungan belum relatif terealisasi dengan baik dan efektif.

Adapun sebagai tolak ukur evaluasi tersebut ialah berdasarkan kategorisasi terhadap hasil wawancara yang penulis lakukan pada narasumber, belum efektifnya pelaksanaan pengawasan ini terbukti dari belum memenuhi SOP walaupun sudah sesuai dengan perencanaannya. Tujuan dan sasaran yang ditentukan buat melibatkan peran masyarakat masih minimnya pemberitahuan serta informasi yang disampaikan agar masyarakat mengetahui dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan pemantauan serta koordinasi terbatasnya jumlah tenaga kerja dalam melakukan observasi lapangan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara kurang efektif dalam melaksanakan perannya buat menanggulangi pencemaran lingkungan. Evaluasi dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum efektif serta efisien yang disebabkan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang merasa masih adanya kekurangan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam hal penanggulangan pencemaran limbah domestik atau biasa disebut sebagai limbah dari hasil aktivitas rumah tangga.

Saran

Jika suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat sesuai dengan perencanaan yang diharapkan maka wajib konsisten dan realistis, pengawasan yang berlanjut harus memiliki koordinasi yang baik. Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat bekerjasama dengan baik agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Utama, W. R., Amiruddin, S., & Fuad, A. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Pangkalan Tni Al (Lanal) Banten Dalam Menjaga Wilayah Perairan Banten* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Malinza, A. N. (2019). *Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup kota binjai dalam penanggulangan pencemaran lingkungan* (Doctoral dissertation).
- Refra, M. S. (2021). Kebijakan Pemimpin Dalam Efektivitas Kerja Pegawai Pada Pt Hasjrat Abadi Kota Sorong. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 84-89.
- Abduh, I. M. N. (2018). *Ilmu dan rekayasa lingkungan* (Vol. 1). Sah Media.
- Islam, F., Priastomo, Y., Mahawati, E., Utami, N., Budiastutik, I., Hairuddin, M. C., ... & Purwono, E. (2021). *Dasar-dasar kesehatan Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurfitri, N. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap Keterampilan Generik Sains Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Sub Konsep Pencemaran Lingkungan (Studi Eksperimen di Kelas X MIA MAN 3 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Pratama, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 24-31.
- Yamin, Y. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *National Journal of Law*, 4(1), 462-479.
- Nurfitri, N. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap Keterampilan Generik Sains Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Sub Konsep Pencemaran Lingkungan (Studi Eksperimen di Kelas X MIA MAN 3 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).